

Sosialisasi Pembuatan Surat Melalui Layanan WAKEPO yang Terintegrasi dengan e-Office Desa di Desa Ranggon

Civitas Consecratio
Volume 3 Nomor 1 2023: 15-28
© Penulis 2023
DOI: 10.33701/cc.v3i1.3207



Socialization of Mail Creation by WAKEPO an Integrated App with e-Office in Ranggon Village

Agung Nurrahman¹, Vira Wirna², Garryko Samosir³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Agung Nurrahman
agung_nurrahman@ipdn.ac.id
+62-813-2170-0925

Abstrak

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dilatarbelakangi oleh adanya layanan WAKEPO yang terintegrasi dengan e-office di Desa Ranggon. WAKEPO merupakan layanan yang menyediakan pelayanan pembuatan surat berbasis WhatsApp yang terintegrasi dengan E-office Desa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Ranggon terkait adanya layanan pembuatan surat administrasi melalui WAKEPO. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan berbasis riset dan kajian. Penulis menggunakan desain quasi eksperimental dengan rancangan penelitian the one group pretest-posttest design (rancangan pra-pasca dalam satu kelompok), dimana semua responden diberikan intervensi atau sosialisasi tanpa kelompok pembandingan. Sasaran pada kegiatan pengabdian adalah masyarakat Desa Ranggon dengan jumlah 30 orang. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah terdapat pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan surat melalui layanan WAKEPO. Peningkatan tersebut dilihat dari nilai mean sebesar 1,13 sebelum sosialisasi dan sesudah dilaksanakan sosialisasi bertambah sebesar 2,50. Dan dari hasil dari Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi bagi masyarakat Desa Ranggon terkait pemanfaatan layanan WAKEPO perlu dilakukan secara berkala, bertahap dan berkelanjutan. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Ranggon agar dapat melakukan kolaborasi dengan masyarakat pemuda Desa Ranggon dalam turut mendorong perubahan mindset masyarakat generasi lama agar dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Kata Kunci

E-office Desa, Sosialisasi, WAKEPO.

Abstract

The background for the community service activities is the WAKEPO service which is integrated with the e-office in Ranggon Village. WAKEPO is a service that provides WhatsApp-based letter writing services that is integrated with the Village E-office. This service activity was carried out with the aim of knowing the extent of the knowledge of the people of Ranggon Village regarding the service of making administrative letters through WAKEPO. This service activity is carried out through a research and study-based approach. The author uses a quasi-experimental design with the one group pretest-posttest design (pre-posttest design in one group), where all respondents are given intervention or socialization without a group comparison. The target for community service activities is the Ranggon Village community with a total of 30 people. The result of the service activities carried out is that there is an influence of socialization on increasing public knowledge about making letters through the WAKEPO service. This increase can be seen from the mean value of 1.13 before the socialization and after the implementation of



the socialization increased by 2.50. And from the results from Sig. (2-tailed) of 0.000. In conclusion, socialization activities for the people of Ranggon Village regarding the utilization of WAKEPO services need to be carried out periodically, in stages and continuously. The author recommends that the Ranggon Village Government be able to collaborate with the youth community of Ranggon Village in participating in encouraging changes in the mindset of the old generation so that they can adapt to technological changes.

Keywords

WA Kepo, Socialization, E-Office Desa

1. Pendahuluan

Teknologi yang semakin berkembang mendorong pemerintah untuk merubah paradigma pelayanan yang pada mulanya dilakukan secara manual kemudian berubah menjadi digital. Pemerintah Indonesia mendukung adanya pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelayanan publik dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, n.d.). Pembangunan pemerintahan melalui pelayanan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkhususnya di desa (Arianto et al., 2014).

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.). Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan pemanfaatan teknologi. Untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengembangkan aplikasi E-Office Desa.

E-Office Desa yang telah dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Sumedang menjadi acuan bagi kabupaten lain dalam menerapkan SPBE (Awaludin, 2022). E-Office Desa juga telah meraih beberapa penghargaan diantaranya, menjadi juara pertama KIJJ 2021 dan juara keempat Nasional Anugerah Meritrokasi Tahun 2021. E-Office Desa merupakan aplikasi yang terintegrasi untuk Perangkat Desa yang ada di Pemerintah Sumedang. E-Office Desa ini telah memberikan kemudahan dalam proses menerima surat, mengirim surat, mendisposisi surat, mengarsipkan surat, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet.

Manfaat yang diterima dengan adanya E-Office Desa juga memudahkan dalam disposisi melalui tanda tangan digital. Menggantikan fungsi finger print untuk absen dengan cara upload foto selfie pada E-Office. Hal ini juga sangat efektif untuk menghindari paparan Covid-19. Penggunaan E-Office Desa dapat mengurangi pengeluaran biaya yang dibebankan untuk pembelian ATK. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dengan adanya E-Office Desa

dapat membuat warga merasa sangat terbantu dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam melakukan pelayanan langsung kepada publik, Pemerintah kabupaten Sumedang telah memiliki sistem dimana masyarakat dapat mengajukan permohonan pembuatan berbagai surat administrasi melalui aplikasi WhatsApp. Nama layanan tersebut ialah Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Layanan Online (WAKEPO) yang sudah terintegrasi dengan e-office desa dan juga sebagai sarana atau media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan secara online (Redaktur, 2021). WAKEPO merupakan salah satu layanan informasi yang diluncurkan oleh Bupati Sumedang, Wakil Bupati bersama Dirjen Otda Kemendagri Akmal A Malik yang bertujuan sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjawab tantangan zaman, yaitu menjawab tantangan pergeseran atau shifting perilaku masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengakses layanan publik.

Saat ini, masyarakat dominan lebih banyak menggunakan sosial media dan messaging platform dalam kehidupan sehari-hari. Itulah alasan yang mendasari pemerintah kabupaten Sumedang menghadirkan layanan via Whatsapp. Berdasarkan faktanya trend masyarakat mengakses website dan download aplikasi mobile semakin menurun. Sedangkan akses messaging platform sosial media terus meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumedang, bahwa masyarakat Sumedang sangat familiar dengan aplikasi Whatsapp. Ini karena whatsapp salah satu media komunikasi yang simpel, ringan dan tidak hanya digunakan oleh masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat di pedesaan. Dengan adanya WAKEPO ini, warga dapat dengan mudah dan cepat mengakses berbagai informasi dan layanan publik di kabupaten Sumedang seperti pembuatan surat pengantar, surat keterangan, pariwisata, kuliner dan layanan lainnya.

Penelitian yang berkaitan dengan e-office cukup banyak dilakukan sebelumnya. Menggunakan pendekatan Unified Medelling Language (UML), ditemukan bahwa terdapat aplikasi yang dapat mendukung penerapan *e-office* dalam kegiatan manajemen surat menyurat (Mudzakir et al., 2022; Tohari et al., 2021). Temuan tersebut dipertegas oleh Prasti et al., (2021) bahwa aplikasi e-office dapat menjadi solusi dalam pengelolaan surat kedinasan. Sementara itu dengan menggunakan metode waterfall sebagaimana dilakukan oleh Arvita et al.,

(2021), diperoleh temuan penelitian bahwa e-office dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Penerapan e-office pada korespondensi kedinasan dinilai dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung terwujudnya tertib administrasi (Rahmah & Ranu, 2015). Oleh sebab itu, dalam penerapan e-office, pegawai membutuhkan adaptasi waktu dalam rangka menyesuaikan dan memanfaatkan aplikasi e-office tersebut (Ummi & Frinaldi, 2020).

Di sisi lain, e-office berbasis website berperan dalam membantu proses penyimpanan suatu dokumen ke dalam bentuk database sehingga pengelolaan surat masuk kedinasan dapat lebih efektif dan efisien (Aditya, 2015; Nofiar. Am et al., 2022). Pernyataan senada disebutkan oleh Mulyono (2018) bahwa aplikasi e-office berupa surat masuk dan surat keluar dapat memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengurus administrasi perkantoran. Beberapa kemudahan yang diberikan oleh e-office diantaranya dapat membantu perekapan semua nomor surat, pencetakan dan pelaporan dokumen yang lengkap yang berimplikasi pada kinerja organisasi (Iqbal & Farell, 2021). Sementara itu tercatat bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang memengaruhi penerapan e-office diantaranya faktor dukungan dari berbagai pihak, sumber daya manusia yang kompeten, iklim kompetensi dan tersedianya teknologi informasi memadai (Nugraha, 2019).

Merujuk pada uraian di atas, diketahui bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Mengingat bahwa keseluruhan hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa e-office memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi kedinasan, bahkan dapat mempercepat pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penulis menilai bahwa dalam rangka mendukung penerapan e-office tersebut, maka pegawai dan masyarakat membutuhkan pendampingan dan pemahaman lebih lanjut.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dan berfokus pada sejauh mana pengetahuan masyarakat desa Ranggon terhadap adanya layanan pembuatan surat administrasi melalui WAKEPO. Dibutuhkannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar dapat mengetahui layanan tersebut serta dapat menggunakannya. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini dilakukan adalah untuk melakukan

kegiatan pendampingan kepada masyarakat berkaitan dengan pembuatan surat melalui layanan WAKEPO yang terintegrasi dengan E-office Desa di Desa Ranggon.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan berbasis riset dan kajian. Penulis menggunakan desain quasi eksperimental dengan rancangan penelitian the one group pretest-posttest design (rancangan pra-pasca dalam satu kelompok), dimana semua responden diberikan intervensi atau sosialisasi tanpa kelompok pembanding. Pretest dilaksanakan untuk mengetahui nilai dan sikap awal responden sebelum dilakukannya sosialisasi. Kemudian dilakukanlah sosialisasi atau pemaparan materi kepada masyarakat. Setelah itu Posttest dilaksanakan untuk mengetahui nilai dan sikap responden setelah dilakukannya sosialisasi (Keumalasari et al., 2017). Dalam pelaksanaannya kegiatan ini memiliki tiga tahap yang terdiri dari pra sosialisasi, sosialisasi dan pasca sosialisasi. Tahap pra sosialisasi berisikan rangkaian persiapan seperti penjadwalan, pembuatan media, persiapan materi sosialisasi, penyusunan serta pembagian kuesioner kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan layanan pembuatan surat melalui WAKEPO dan langkah-langkah untuk menggunakan layanan tersebut. (a) pengguna layanan harus memiliki perangkat (smartphone) dan memiliki akun WA, (b) pengguna dapat langsung memperoleh layanan dengan mengetik “#simpati” dan mengirimkannya pada nomor wa layanan masyarakat desa 0811-2000-0999, (c) kemudian akan muncul daftar layanan berbagai macam surat yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna, (d) jika sudah memilih surat yang dibutuhkan maka pengguna akan diminta memberikan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan domisili pengguna, (e) selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi beberapa data yang ada di surat, (f) setelah itu pihak perangkat desa akan menerima pengajuan surat yang terintegrasi langsung dengan e-office desa pada desa pengguna tersebut, (g) Jika pengajuan diterima dan ditandatangani secara digital oleh kepala desa, maka surat otomatis langsung terkirim ke pemohon surat dalam bentuk softfile dan dapat dicetak oleh pengguna sendiri. Materi tersebut disampaikan langsung secara umum menggunakan smartphone (Gambar 1.) dan juga dijelaskan secara khusus kepada masyarakat desa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi: demonstrasi prosedur pembuatan surat di depan umum; dan demonstrasi secara khusus perorangan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di kantor Desa Ranggon dan melibatkan tiga puluh masyarakat. Sebelum melakukan sosialisasi penulis sudah memilih responden secara acak yaitu sebanyak tiga puluh orang untuk dilakukannya pretest guna menentukan pengetahuan dan sikap atau nilai awal responden. Selanjutnya responden diberikan sosialisasi, setelah itu dilakukan posttest pada semua responden untuk mengetahui efek perlakuan pada responden. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dan data dianalisis dengan uji paired t-test. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 30 November 2022.

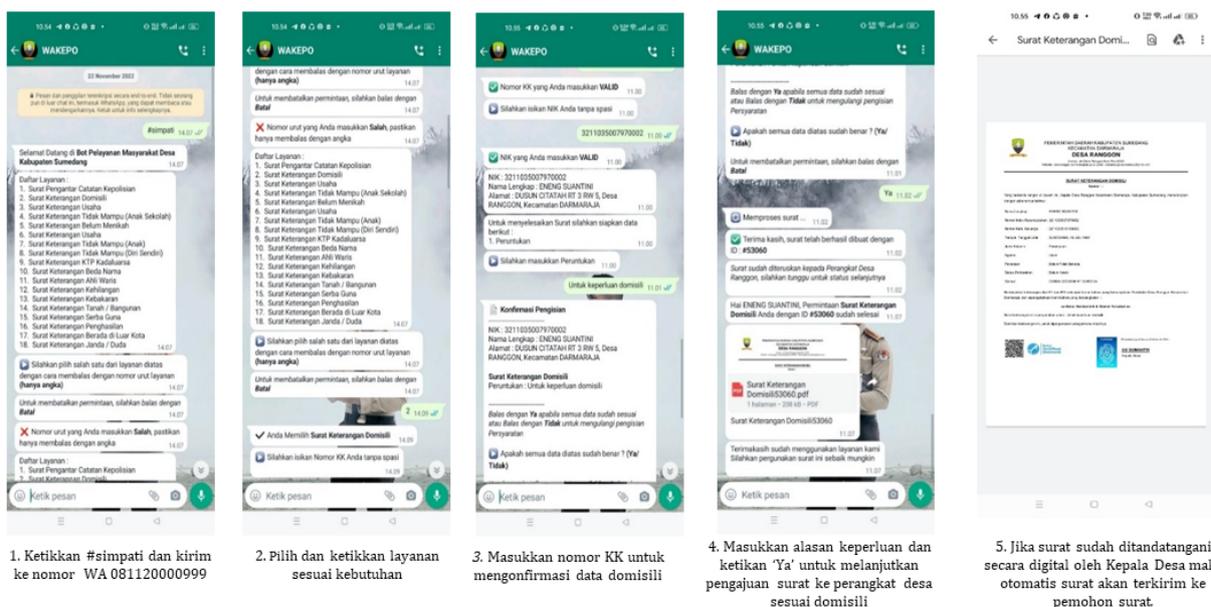
3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim penulis, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu (Rizky, 2021).

Tetapi sayangnya pelaksanaan sosialisasi program belum terlaksana dengan baik, dikarenakan banyaknya desa dan luasnya kecamatan yang menyebabkan sosialitator perlu mendatangi langsung untuk melakukan sosialisasi (Garmana et al., 2022). Sosialisasi yang dilaksanakan dalam pengabdian ini merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat untuk memperoleh pengetahuan baru, nilai atau keterampilan agar dapat berinteraksi dengan lingkungan (Haryanto, 2018). Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi untuk mengembangkan tingkat pengetahuan masyarakat (Jabar, 2019). Sosialisasi yang dilakukan pada saat pengabdian berlangsung dilakukan dengan cara mengumpulkan warga Desa Ranggon di kantor desa. Kemudian dilakukan pemaparan dengan dipraktekkan secara langsung menggunakan alat bantu handphone. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh pemateri dan peserta.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan berisikan materi terkait dengan tahapan permohonan surat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa melalui WAKEPO. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 2. di bawah ini.

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh penulis adalah berkaitan dengan tahapan dan alur permohonan pembuatan surat yang dapat disampaikan oleh masyarakat melalui WAKEPO sebagaimana pada gambar 2 di atas. Penulis berupaya memberikan penjelasan dengan Bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat desa dapat mengetahui, memahami dan mempraktekkan secara langsung terkait pemanfaatan WAKEPO tersebut.



1. Ketikkan #simpati dan kirim ke nomor WA 081120000999

2. Pilih dan ketikkan layanan sesuai kebutuhan

3. Masukkan nomor KK untuk mengonfirmasi data domisili

4. Masukkan alasan keperluan dan ketikkan 'Ya' untuk melanjutkan pengajuan surat ke perangkat desa sesuai domisili

5. Jika surat sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala Desa maka otomatis surat akan dikirim ke pemohon surat

Gambar 2. Prosedur Pembuatan Surat Melalui WAKEPO



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan terkait WAKEPO kepada masyarakat Desa Ranggon Kecamatan Damaraja

Selain melakukan penyampaian materi terkait WAKEPO, penulis juga melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat Desa Ranggon terkait tahapan dan alur permohonan surat melalui WAKEPO sebagaimana yang terlihat pada gambar 3. Sosialisasi yang dilakukan dengan menyampaikan materi terkait WAKEPO disambut antusias oleh masyarakat Desa Ranggon. Berikutnya, penulis juga membuka ruang diskusi dengan masyarakat Desa Ranggon terkait materi yang disampaikan. Tanya jawab dalam diskusi menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ranggon dalam memanfaatkan WAKEPO tersebut.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ranggon diantaranya adalah:

1. Sebagian masyarakat tidak memiliki gadget *smart phone* untuk bias mengakses WAKEPO sehingga berimplikasi pada pemikiran bahwa mengurus surat yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor Desa Ranggon;
2. Pemikiran masyarakat desa yang masih belum memahami pemanfaatan teknologi yang dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam menerima layanan publik yang disediakan oleh Desa Ranggon;
3. Terdapat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat desa yang belum terdata dalam WAKEPO;
4. Sebagian masyarakat Desa Ranggon belum tertarik untuk melakukan permohonan surat yang dibutuhkan dengan memanfaatkan WAKEPO karena memiliki *mindset* bahwa dengan datang ke kantor desa lebih leluasa untuk bertanya dan berdiskusi dengan pegawai desa jika terdapat kekurangan berkas dan kendala lainnya.
5. Sebagian masyarakat Desa Ranggon belum mengetahui tahapan dan manfaat dari WAKEPO.

Setelah melakukan inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, penulis membuka ruang dan diskusi dengan pegawai Desa Ranggon. Merujuk pada hasil diskusi tersebut, diperoleh informasi bahwa kondisi ekonomi tiap masyarakat desa tidak semuanya memiliki kemampuan untuk membeli dan memiliki smart phone atau gadget sehingga kantor Desa Ranggon tetap membuka ruang dan waktu bagi masyarakat desa yang membutuhkan layanan untuk datang ke kantor Desa Ranggon. Walaupun teknologi hadir memberikan kemudahan bagi masyarakat dan instansi pemerintah desa namun Pemerintah Desa Ranggon juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses dalam memanfaatkan WAKEPO tersebut.

Menurut penulis, hal tersebut menjadi menarik bahwa WAKEPO hadir tidak menghilangkan layanan konvensional yang umumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ranggon. Prinsip yang dikedepankan adalah mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran. Sehingga, kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ranggon dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat desa.

Pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung juga telah dilakukan inventarisasi kendala atau permasalahan yang secara umum dihadapi oleh pegawai Desa Ranggon dalam melayani WAKEPO kepada masyarakat. Merujuk pada hasil diskusi, diketahui informasi bahwa tidak ada kendala yang serius dalam memanfaatkan WAKEPO karena secara umum pegawai Desa Ranggon dapat memahami tahapan dan alur permohonan surat melalui WAKEPO. Selain itu, sudah terdapat format yang disediakan dalam memanfaatkan WAKEPO sehingga memberikan kemudahan bagi pegawai Desa Ranggon. Kemudahan lainnya adalah system dan mekanisme WAKEPO sudah sangat sederhana untuk dipahami dan dapat merespon secara otomatis oleh BOT. Namun di sisi lain, terdapat kendala yang berkaitan dengan typo atau salah ketik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ranggon saat melakukan usulan permohonan surat yang dibutuhkan melalui WAKEPO. Hal tersebut menimbulkan kurangjelasnya maksud dari pengajuan surat yang diusulkan. Sehingga pegawai Desa Ranggon perlu lebih teliti dalam membaca permohonan dan dalam menerbitkan surat yang dimaksud.

Salah satu faktor pendorong dalam penerapan WAKEPO dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik di Kantor Desa Ranggon, adalah terdapat kejelasan regulasi dalam hal ini adalah Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Merujuk regulasi tersebut, maka wujud dari penerapannya adalah dengan menghadirkan inovasi WAKEPO dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Ranggon. Inovasi WAKEPO memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Ranggon sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan layanan publik kapan pun dan dimana pun tanpa harus terbatas ruang dan waktu. Faktor pendorong lainnya adalah ketersediaan aparatur desa yang sudah memahami dan dapat mengoperasikan layanan publik dalam bentuk digital. Berikutnya jaringan internet yang cukup memadai untuk mengakses dan menindaklanjuti usulan permohonan surat dari masyarakat melalui WAKEPO.

Dalam rangka mengukur pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa terkait materi WAKEPO yang diberikan oleh penulis, maka penulis membagikan kuesioner pada saat sebelum dan sesudah sosialisasi dilakukan. Sehingga menghasilkan data pretest dan posttest dengan menggunakan uji paired t-test yang menunjukkan hasil perubahan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap layanan WA Kepo sebagai berikut:

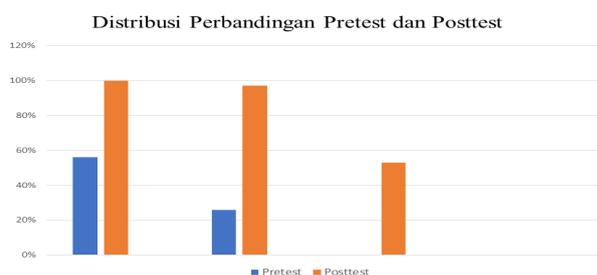


Diagram 1. Distribusi Perbandingan Pretest dan Posttest Pengetahuan Responden (n=30)

Keterangan Soal Diagram 1:

- Apakah Anda tahu pembuatan surat dapat dilakukan melalui layanan WA Kepo?
- Apakah Anda tahu cara penggunaan layanan WA Kepo?
- Apakah Anda tertarik membuat surat melalui layanan WA Kepo?

Berdasarkan Diagram 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari tiga pertanyaan dalam kuisisioner yang telah disebarkan didapatkan hasil jawaban dengan jawaban Ya terbanyak pada pretest adalah pertanyaan tentang tahunya masyarakat mengenai pembuatan surat melalui layanan WA Kepo sebesar 56%. Sedangkan hasil kuisisioner setelah dilaksanakan sosialisasi posttest untuk pertanyaan dengan jawaban

Ya terbanyak juga diperoleh dari pertanyaan yang sama dengan presentase sebesar 100%.

Perbedaan Nilai Rata-Rata Pengetahuan Responden Pretest dan Posttest. Dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 berikut ini menjelaskan perbedaan nilai rata-rata pengetahuan responden pada saat pretest dan posttest.

Tabel 1.
Perbedaan Nilai Rata-Rata Pengetahuan Responden Pada Saat Pretest Dan Posttest.

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRE TEST	1.13	30	.776	.142
	POST TEST	2.50	30	.572	.104

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan output kelompok yang dianalisis pada uji beda yaitu pasangan variabel (pair 1) terdiri dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan WA Kepo sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi. Rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dilaksanakan sosialisasi sebesar 1,13 dan sesudah dilaksanakan sosialisasi bertambah sebesar 2,50. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan menunjukkan peningkatan nilai rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan surat melalui layanan WA Kepo.

Tabel 2.
Hasil Nilai Korelasi
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PRE TEST & POST TEST	30	.543	.002

Tabel 2 menunjukkan hasil nilai korelasi (hubungan kinerja sebelum pelaksanaan sosialisasi dan sesudah sosialisasi) hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,543, nilai koefisien korelasi ini lebih dari 0,05, sehingga memberikan hasil gambaran berupa adanya keterkaitan hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembuatan surat melalui layanan WA Kepo sebelum dan sesudah sosialisasi.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Perbedaan Dua Sampel

		Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Lower	Upper			
Pair 1	PRE TEST - POST TEST	-1.367	.669	.122	-1.616	-1.117	-11.195	.000

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian perbedaan dua sampel yang berpasangan. Diketahui hasil dari Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembuatan surat melalui layanan WA Kepo pada data *pretest dan posttest*.

3.1. Diskusi

Kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui sosialisasi dan membuka ruang diskusi baik bersama masyarakat maupun pegawai Desa Ranggon menghasilkan beberapa temuan utama. Temuan utama yang dianalisis oleh penulis berkaitan dengan pola pikir atau *mindset* masyarakat Desa Ranggon yang masih beranggapan bahwa datang ke kantor Desa Ranggon lebih efektif dibandingkan dengan mengisi *form* atau melakukan usulan kebutuhan surat melalui WAKEPO. Sementara itu menurut Palinggi & Allolinggi (2019) dalam rangka mewujudkan ekosistem digital, hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan *mindset*. Pendapat dari Palinggi di atas sejalan dengan hal yang dilaksanakan oleh Kartika et al., (2022) bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pelaku usaha, adalah dengan melakukan pembinaan pola pikir masyarakat. Disamping melakukan perubahan *mindset*, masyarakat juga dapat memperoleh motivasi baik dari pihak luar maupun dari dalam diri untuk terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini (Wakhyuni et al., 2021). Senada dengan itu, Handika & Satwika (2021), menyatakan bahwa amanat pemerintah terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik memerlukan pergeseran pola pikir konvensional menuju digitalisasi, tidak hanya dilakukan oleh pegawai pemerintah saja tetapi juga bagi masyarakatnya.

Perubahan *mindset* sebagai langkah awal bagi masyarakat mengingat kemudahan yang dapat diperoleh saat memanfaatkan teknologi digital cukup banyak, diantaranya waktu pelayanan menjadi lebih cepat karena dalam penginputan data administrasi telah dibantu oleh teknologi (Mardiyanto et al., 2020). Sejalan dengan itu, maka sebagaimana pendapat dari Wardani & Setyawan (2018), bahwa peningkatan kinerja pegawai dapat terwujud. Sebaliknya, ketika masyarakat masih memiliki pola pikir konvensional dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa pun masih konvensional, maka dapat berimplikasi pada waktu pelayanan yang lebih lama (Yunita et al., 2022). Mempertegas hal tersebut, Hardianty & Yustiana (2021) juga menemukan bahwa pembuatan

surat secara manual akan mendatangkan keluhan dari masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan serba cepat sehingga system informasi pelayanan surat mandiri sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses pelayanan tersebut.

Di sisi lain, hasil penelitian penulis berkaitan dengan pola pikir konvensional yang masih dimiliki oleh masyarakat Desa Ranggon mempertegas temuan penelitian sebelumnya dari Nurrahman et al., (2022), bahwa dalam penerapan sebuah aplikasi atau teknologi baru akan berhadapan dengan golongan yang relative lebih tua (yaitu masyarakat yang berumur di atas 45 tahun) yang akan mengalami kesulitan dan keterbatasan pada saat memanfaatkan teknologi atau aplikasi tertentu. Pendekatan yang signifikan dibutuhkan dalam menghadapi masyarakat pedesaan agar pemerataan pelayanan secara digital dapat lebih tepat sasaran (Marsudi, 2022). Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang konvensional tersebut dapat disiasati dengan pemberian ruang pelayanan pemerintah Desa Ranggon bagi masyarakat untuk tetap bisa secara langsung datang ke kantor desa. Menurut penulis, Pemerintah Desa Ranggon dapat memperluas strategi lainnya dalam mempertegas *mindset* masyarakat yang masih konvensional, salah satu caranya dapat dilakukan dengan menjaring kolaborasi dengan masyarakat generasi pemuda untuk dapat menciptakan program atau kegiatan yang dapat mendorong perubahan *mindset* masyarakat Desa Ranggon tersebut. Hal ini telah dibuktikan oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saidah et al., 2022) yang menyatakan bahwa salah satu pendekatan yang telah dilakukan di Desa Krandengan dalam membantu masyarakat desa beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi adalah dengan melakukan pendekatan pemuda.

Temuan berikutnya yang dapat penulis analisis berkaitan dengan adanya kejelasan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terkait dengan penerapan e-office di desa. Kejelasan regulasi tersebut dapat memperkuat penerapan e-office agar dapat diimplementasikan secara jelas dan tepat sasaran. Hasil temuan dari kegiatan pengabdian ini mempertegas adanya temuan pada penelitian sebelumnya yang diperoleh (Diana, 2019) bahwa lahirnya reformasi birokrasi ditandai dengan bergesernya paradigma regulasi menghambat (*wall regulation*) menuju regulasi mendorong (*enabling regulation*). Kaitannya dengan penerapan WAKEPO di Desa Ranggon, maka dengan lahirnya peraturan daerah sebagai salah satu factor pendukungnya, dapat dikategorikan

bahwa regulasi tersebut termasuk ke dalam regulasi mendorong (*enabling regulation*). Namun hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa adanya regulasi saja belum cukup dalam menerapkan suatu inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana pendapat dari Supardal (2016) yang menyatakan bahwa regulasi perlu disertai dengan kejelasan standar operasional prosedur (SOP) terkait program yang diterapkan, di samping itu perlu diimbangi dengan sumber daya yang memadai dan gaya kepemimpinan yang inovatif. Kejelasan prosedur dalam penerapan WAKEPO di Desa Ranggon sudah cukup baik ditandai dengan adanya transparansi terkait tahapan dan alur pemanfaatan WAKEPO yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Ranggon.

Kejelasan regulasi akan berkaitan dengan informasi yang jelas yang dapat diimplementasikan ke dalam suatu tindakan (Mardianto, 2020). Kaitannya dengan WAKEPO, perangkat Desa Ranggon telah berupaya dalam mengetahui dan memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam menyebarkan informasi terkait WAKEPO kepada masyarakat Desa Ranggon sebagai penerima manfaat. Di samping itu, dari regulasi yang diterbitkan pun telah menunjuk secara jelas siapa pelaksana yang bertanggung jawab dalam penerapan WAKEPO di Desa Ranggon. Tercatat 1 (satu) orang operator yang berasal dari pegawai Desa Ranggon bertanggung jawab untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat Desa Ranggon yang disampaikan melalui WAKEPO. Fakta dilapangan tersebut menegaskan pendapat Nadaria (2020) dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, bahwa adanya kejelasan regulasi berkaitan erat dengan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan atau program untuk mengimplementasikannya kebijakan atau program tersebut.

Peraturan yang mendukung penerapan e-office di Desa Ranggon dapat menjadi salah satu kekuatan tersendiri. Hal ini sebagaimana penjelasan dari pendapat Eprilianto et al., (2019) bahwa regulasi yang berkaitan dengan desa digital dapat menjadikan inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah desa memiliki posisi dan peran yang strategis untuk dioptimalkan. Di samping itu, menurut Adabiyah (2020) bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tersebut dalam penerapan WAKEPO di Desa Ranggon dapat mempertegas pentingnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kejelasan peraturan dalam penerapan WAKEPO diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi

dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masuarkat di Desa Ranggon. Sebagaimana pendapat dari Ramdhan et al., (2022) bahwa penerapan e-office di desa dapat menjadi solusi dalam pengaturan pola pekerjaan pegawai desa sehingga berimplikasi pada efektif dan efisiennya fungsi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat desa.

Temuan berikutnya adalah berkaitan dengan potensi sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Desa Ranggon. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan dalam uraian sebelumnya, bahwa pegawai Desa Ranggon memiliki *mindset* dan sikap yang telah bergeser dari konvensional menuju digital. Hal ini ditandai dengan adanya kemampuan pegawai dalam mengetahui dan memahami tahapan, alur dan manfaat dari WAKEPO. Temuan dari hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan penulis tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thamrin et al., (2021) bahwa dalam penerapan aplikasi layanan public maka perlu memperhatikan faktor kemampuan pegawai yang ditandai dengan bimbingan pelayanan aparatur, disamping faktor pendukung lainnya seperti faktor aturan, faktor organisasi dan faktor pendapatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah dengan mengikutsertakan pegawai ke dalam kegiatan pelatihan. Hal ini telah dibuktikan oleh Cahyana (2021) bahwa setelah dilakukan pelatihan TIK maka pegawai desa dapat lebih mampu mengoperasikan penggunaan software yang akan membantu pegawai dalam pemberian layanan public di desa. Salah satu dasar dari pengembangan TIK adalah adanya sumber daya manusia. Sejalan dengan pendapat Pangondian et al., (2019) bahwa disamping sumber daya manusia yang berkualitas, juga dibutuhkan adanya infrastruktur TIK yang memadai dan perangkat keras serta perangkat lunak.

Kualitas sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu tolak ukur bagi keberhasilan penerapan layanan digital publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegawai Desa Ranggon memiliki potensi yang memadai dalam pemanfaatan WAKEPO. Hasil temuan tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari et al., (2019), yang menyatakan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas dan infrastuktur teknologi yang terbatas menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan sosialisasi layanan publik tidak dapat terlaksana dengan berkelanjutan dan merata. Temuan senada pun dihasilkan oleh Dotulung et

al., (2021) yang menyatakan bahwa dalam rangka mempertahankan esensi dalam pelayanan public secara online maka perlu memperhatikan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Subhan (2019) menyatakan bahwa disamping kurangnya dukungan internet yang memadai dan jangkauan jarak kantor desa yang relative jauh dengan pemerintahan daerah, disebutkan pulan bahwa adanya sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang kurang memahami terkait system atau aplikasi tertentu dalam pelayanan public secara digital, dinilai dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi penerapan layanan tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia yang kompeten di desa, sebagai pelaksana dalam layanan public secara digital, dapat menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah. Sejalan dengan itu Alfayn & Istiqoh (2022) menjelaskan bahwa langkah strategis pertama yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pelayanan public adalah dengan mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, Hadijah (2020) menambahkan bahwa dalam rangka mensukseskan penerapan layanan publik pada era digital saat ini maka dibutuhkan sejumlah pegawai yang berusia muda dan gesit agar mampu menyeimbangi pegawai dari generasi lama untuk lebih menguasai dan mampu mengoperasikan jaringan, program maupun aplikasi layanan yang relevan lainnya.

Potensi dan kemampuan sumber daya manusia pegawai Desa Ranggon menunjukkan potensi yang memadai dalam memanfaatkan layanan WAKEPO, namun menurut penulis, Pemerintah Desa Ranggon masih perlu melakukan penguatan kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa khususnya operator yang bertugas dalam menindaklanjuti usulan permohonan pembuatan surat melalui WAKEPO. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka persiapan dalam menyambut baik inovasi lain yang kedepannya akan diterbitkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu sendiri. Sejalan dengan penguatan kelembagaa pemerintahan desa juga pernah disinggung oleh Sulismadi et al., (2017) bahwa dalam penyelenggaraan inovasi pemerintahan, tidak hanya masyarakat desa yang harus dibiasakan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi tetapi juga penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan menambah jumlah perangkat desa yang kompeten sangat perlu untuk dilakukan.

Temuan berikutnya dalam hasil pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah tercapainya

peningkatan pengetahuan yang diperoleh masyarakat Desa Ranggon berkaitan dengan pemanfaatan WAKEPO. Penulis menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam membantu Pemerintah Desa Ranggon untuk menyebarluaskan informasi terkait WAKEPO kepada masyarakat desa. Keberhasilan dalam menerapkan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat juga dirasakan oleh Ronando et al., (2023) bahwa setelah melakukan sosialisasi, masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih memahami fitur dari aplikasi yang diterapkan di desa, yang dapat diukur dari 5 aspek yang secara signifikan mengalami peningkatan. Hal tersebut juga dihadapi oleh Hartati (2022) bahwa setelah melakukan kegiatan sosialisasi dapat terukur capaian pemuktahiran data kependudukan sejumlah 89 persen. Pernyataan tersebut senada dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Atmajaya & Wirata (2021), bahwa sosialisasi yang kurang dilakukan dapat menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Apabila menganalisis aspek kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maka dapat bersinggungan dengan ketersediaan anggaran (Oktaviana et al., 2022). Di samping itu, kegiatan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan kepada masyarakat desa dinilai dapat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kinerja aparatur desa dalam penyediaan layanan public (Kurniawan et al., 2021). Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa juga dapat meningkatkan motivasi masyarakat desa untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang disosialisasikan (Hartati et al., 2017). Disamping sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Ranggon, terlebih dahulu pemerintah daerah telah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai Desa Ranggon terkait penerapan WAKEPO. Sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai desa dapat dilakukan dengan disertai oleh kegiatan pelatihan agar terwujudnya pemantapan dan penguatan dalam menindaklanjuti usulan permohonan surat yang disampaikan oleh masyarakat melalui WAKEPO.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai desa adalah dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat desa itu sendiri (Ediwijoyo et al., 2020). Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait dapat meningkatkan pemahaman pada admin e-office dalam tataran praktis (Mardianto, 2020).

Menindaklanjuti hasil dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Desa Ranggon, dapat diketahui informasi bahwa kegiatan sosialisasi tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap, berkala dan berkelanjutan. Sosialisasi dapat dijadwalkan secara rutin dan menyentuh seluruh elemen masyarakat dari tingkat RT/RW. Sosialisasi WAKEPO dapat dilakukan oleh pemerintah desa berkolaborasi bersama pemuda Desa Ranggon dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk berdiskusi dan mempraktekkan langsung layanan WAKEPO tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat desa yang dilakukan juga dapat mengundang akademisi atau tim ahli pemerintahan yang relevan dengan pemanfaatan layanan WAKEPO. Sementara itu tercatat beberapa tahapan dalam strategi sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan layanan pemerintahan berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut: 1) Tahapan sosialisasi pertama yaitu dilakukan untuk pimpinan lembaga pemerintah disebabkan oleh pemimpin daerah memegang kunci sentral dalam menerapkan fungsi pemerintahan di daerah; 2) Tahapan penekanan sosialisasi kepada pimpinan mengenai manfaat dari penggunaan TIK; 3) Tahapan penyusunan rencana induk pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik yang menekankan sosialisasi pada *brand awareness* bagi masyarakat terkait manfaat dan tujuan dari pelayanan berbasis elektronik (Sosiawan, 2008). Dengan demikian, penulis menilai bahwa kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan pegawai Desa Ranggon perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat layanan WAKEPO dapat dirasakan secara meluas khususnya bagi masyarakat Desa Ranggon.

Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh penulis, berfokus pada masyarakat Desa Ranggon sebagai penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh harapan penulis yang relative besar bahwa sosialisasi yang dilakukan akan lebih berdampak secara meluas bagi masyarakat Desa Ranggon terutama pada saat memahami manfaat dan tujuan dari layanan WAKEPO serta dapat memanfaatkan WAKEPO secara efektif dan efisien. Di sisi lain keterbatasan dari kegiatan pengabdian ini adalah, penulis belum merangkul keseluruhan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranggon karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian dengan topik, fokus atau obyek yang sama, dapat memperluas jumlah sasaran penerima manfaat kegiatan yang dilaksanakan. Di samping itu, kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dilakukan

dengan menggunakan metode pengabdian selain sosialisasi dan pendampingan, agar dapat memperoleh hasil lain yang lebih relevan dengan sudut pandang yang berbeda.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pembuatan surat melalui layanan WAKEPO yang terintegrasi dengan e-office Desa di Desa Ranggon dilaksanakan dengan penyampaian materi terkait manfaat, alur dan tahapan WAKEPO kepada masyarakat Desa Ranggon sebagai penerima manfaat. Sementara itu, kegiatan pengabdian yang dilakukan pun menghasilkan inventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian didiskusikan secara terbuka bersama pegawai Desa Ranggon untuk menemukan solusinya. Sementara itu hasil yang didapatkan oleh penulis terkait perubahan tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakannya sosialisasi oleh penulis, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan yang dapat dinilai dari uji paired t-test. Adanya peningkatan nilai rata-rata pengetahuan masyarakat setelah pelaksanaan sosialisasi. Hubungan keterkaitan sebelum dan pelaksanaan sosialisasi layanan WAKEPO. Perubahan yang nyata terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat tentunya sebagai hasil dari pengaruh sosialisasi. Dengan demikian, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Ranggon untuk dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi secara bertahap, berkala dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa WAKEPO terutama dalam pemanfaatan layanan WAKEPO. Di samping itu, Pemerintah Desa juga dapat lebih intens dalam mempengaruhi, kebersamai dan melakukan pendampingan bagi masyarakat Desa Ranggon terutama bagi masyarakat yang masih memiliki pola pikir konvensional agar secara bertahap dapat menerima perubahan teknologi saat ini.

5. Referensi

- Adabiyah, L. F. (2020). *Analisis Penerapan E-Office Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/28235/>
- Aditya, M. R. (2015). *Rancang Bangun Aplikasi Surat Menyurat Adopsi Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya (Simaya)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/146274/>
- Alfayn, Z. H. A. M. A. N., & Istiqoh, A. E. (2022). Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis

- E-Government di Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3). <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2143/1283>
- Arianto, I. D. (2018). Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Jombang. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 59–68. <https://doi.org/10.33005/jdg.v8i1.1216>
- Arvita, Y., Siswanto, A., Wijaya, I. S., Irawan, & Sholeh, A. S. (2021). Perancangan E-Office Administrasi Pada Kantor Kelurahan Muara Bulian. *PROCESSOR*, 16(2). <https://doi.org/10.33998/processor.2021.16.2.1093>
- Atmajaya, D. G., & Wirata, G. gede. (2021). Peranan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. *Widyanata*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.529>
- Cahyana, Y. (2021). Pembekalan Penggunaan Software dan Pemahaman Teknologi Untuk Perangkat Desa Di Desa Pasirukem. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 7(2). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/11211/6026>
- Diana, B. A. (2019). Konsep E-Office Menuju Perubahan Pelayanan Birokrasi Berbasis Digital (good governance). *Prosiding Seminar Stiarni*, 6(1). <https://ojs.stiarni.ac.id/index.php/PS/article/view/366/227>
- Dotulung, B., Lopian, M. T., & Sampe, S. (2021). Sistem Pengelolaan Data Dan Tata Penyuratan di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Governance*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35766>
- Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT Publication (Journal of Community Service)*, 1(3). <http://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/jurpikat/article/view/412>
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2). <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Garmana, D. H., Sugihartiawan, A., Nuraeni, N., Rahayu, R. A., Megayani, S., Yulaeha, Y., & Aziz, T. (2022). Efektivitas Program Tanda Tangan Elektronik di Diskominfo Sandik Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 49–55. <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/91>
- Hadijah, S. (2020). Penerapan Efektivitas E-Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 19(2). <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/PD/article/view/6087/5636>
- Handika, I. P. S., & Satwika, I. K. S. (2021). Aplikasi E-Surat Sebagai Upaya Pendukung Tata Kelola Pemerintahan Di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, Bali. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/rabit.v6i2.1838>
- Hardianty, D. A., & Yustiana, I. (2021). Information System for Cibolang Kaler Village Correspondence Service Website-Based. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v6i2.423>
- Hartati, Farisi, M., & Sari, E. B. P. (2017). *Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik Di Desa Selat Kecamatan Pemayung [Universitas Jambi]*. https://repository.unja.ac.id/17464/1/artikel-Artikel_Pengabdian_Kepada_Masyarakat_2017.PEMAYUNG.pdf
- Hartati, S. (2022). Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatiningor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2729>
- Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Iqbal, M., & Farell, G. (2021). Perancangan Sistem E-Office Kantor Wali Nagari Sungai Buluh Selatan. *Journal of System and Computer Engineering*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jsce.v2i1.195>
- Jabar, A. (2019). Efektivitas Sosialisasi Wisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang [UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14175/>
- Kartika, C., Chamariyah, & Sarie, R. F. (2022). Usaha Kecil Krupuk Ikan Gabus Di Dusun Sumber

- Rejodk. Kauman Surabaya. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 6(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/abadimas.v6.i01.a5901>
- Keumalasari, Hasballah, K., & Imran. (2017). Promosi Kesehatan Cuci Tangan Dan Jajanan Sehat Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 5(1), 1–11. <https://jurnal.usk.ac.id/JIK/article/view/8768>
- Kurniawan, R., Arkan, F., & Puriza, M. Y. (2021). Membangun Sistem Informasi Desa Untuk Pelayanan Publik Prima Berbasis Cloud Server Di Desa Pagarawan Kabupaten Bangka. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v5i2.7793>
- Lestari, Y. D., Nugraha, J. T., & Fauziah, N. M. (2019). Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, XVI(2). <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/230/pdf>
- Mardianto. (2020). *Implementasi e-Office pada Dinas Energi dan Sumberdaya mineral Provinsi Riau* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/18691/1/167110817.pdf>
- Mardiyanto, Herniyanti, F., & Sari, N. Y. (2020). Development of Population Data Collection Applications in Vital Village Based on Mobile Web. *JTKSI*, 03(03). <https://doi.org/10.56327/jtksi.v4i3.1057>
- Marsudi, T. A. A. (2022). Pengembangan Soft Kill Pemerintah Desa Mojomalang Mojomalang: Studi Pada Kasus Fitur Layanan Mandiri. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1943>
- Mudzakir, T. Al, Pratma, A. R., & Juwita, A. R. (2022). SYSTEM INFORMASI TRAKING SURAT MENYURAT. *Jurnal Buana Ilmu*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/bi.v6i2.2508>
- Mulyono, T. (2018). Sistem Informasi E-Office Sebagai Pendukung Program Paperless Korespondensi Perkantoran (Studi Kasus: Bagian Administrasi Akademik Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik). *Tecnoscienza*, 2(2). <http://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Tecnoscienza/article/view/65>
- Nadaria, S. (2020). *Implementasi E-Office Pada Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/26684/>
- Nofiar, Am, A., Oktorina, F. K., Fitri, F., & Ridwan, M. (2022). Pembuatan Sistem Informasi E-Office KUD Sawit Jaya Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter 3. *JDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58794/jdt.v2i1.42>
- Nugraha, H. (2019). Model Implementasi Inovasi di Sektor Publik Studi pada Inovasi E-Office Satu Pintu di Puslatbang PKASN LAN. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(2). <https://doi.org/DOI : 10.31845/jwk.v22i2.172>
- Nurrahman, A., Santoso, E. B., Zulfahmi, K., & Guntoro, D. (2022). Efektivitas Aplikasi Sipinter Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wabana Bhakti Praja*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jjwbp.v12i1.2660>
- Oktaviana, R., Yuliani, F., & Adianto. (2022). Efektivitas Pelaksanaan e-Office Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7387>
- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>
- Pangondian, R. A., Santosa, P. I., & Nugroho, E. (2019). Faktor Yang Harus Dipenuhi Oleh Sistem Informasi Pemerintahan (E-Government) Dalam Menghadapi Disrupsi Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/inotek.v3i1.505>
- Prasti, D., Darmawati, Rusdi, M. I., Muhlis, & Yasir, F. N. (2021). E-Office Administrasi Persuratan. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/dcompute.v11i1.10>
- Rahmah, S. U., & Ranu, M. E. (2015). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Menerapkan E-Office Untuk Mendukung E-Government Dalam Kegiatan Korespondensi Kedinasan Di Fakultas

- Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 3(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12530>
- Ramdhan, W., Rahayu, E., & Santoso, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Berbasis Smart Human Resource Di Dusun Guntung Kabupaten Batubara. *Communnity Development Journal*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4396>
- Redaktur. (2021). 'Wakepo' Permudah Pelayanan dan Informasi Berbasis WA.
- Rizky, R. (2021). *Diskominfosanditik Sosialisasikan e-Office Desa*. <https://inisumedang.com/diskominfosanditik-sosialisasikan-e-office-des/>
- Ronando, E., Indasyah, E., & Mastuki. (2023). Penerapan dan Pelatihan Sistem Layanan Surat Bagi Masyarakat Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *ERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3994>
- Saidah, N., Sekaran, G., Khasanah, L., Asriyatzahra, & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* /, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135>
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. *Seminar Nasional Informatika, 2008*(November 2007), 88–98. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/759/639>
- Subhan, H. K. (2019). *Implementasi Sistem E-Village Budgeting di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi* [Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90542>
- Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo: Sosial Politi Humaniora*, 5(1). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/487/450>
- Supardal. (2016). Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272/257>
- Thamrin, A. M. H., Adnan, A. A., & Uceng, A. (2021). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Bumdes Terhadap Pelayanan Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.512>
- Tohari, H., Kudhori, A., & Wibowo, S. G. (2021). Aplikasi Paperless Office dalam Implementasi Electronic Office Menggunakan Pendekatan Unified Modelling Language. *Smart Comp*, 10(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/smartcomp.v10i3.2904>
- Ummi, P., & Frinaldi, 2Aldri. (2020). Efektivitas E-Office Di Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasaman Barat Dalam Era Governensi Digital. *Jsdmu: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggu*, 1(1). <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1.9>
- Wakhyuni, E., Setiawan, N., Siregar, N., & Setiawan, A. (2021). Mendorong Perubahan Mindset dan Motivasi Pelaku UMKM Selama Masa Pandemi di Wilayah Kota Padangsimpuan. *Rambate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 123–128. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate/article/view/2292/0>
- Wardani, N. S. K., & Setyawan, S. (2018). *Adopsi Inovasi Aplikasi Suket (Surat Keterangan) Mobile (Studi Deskriptif Kualitatif Adopsi Aplikasi Suket Mobile Di Desa Tangkil Kabupaten Sragen)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <http://eprints.ums.ac.id/69044/>
- Yosep Awaludin. (2022). *Buton Tengah Replikasi e-Office dan e-Office Desa Sumedang*. <https://www.korsum.id/buton-tengah-replikasi-e-office-dan-e-office-desa-sumedang/>
- Yunita, A. M., Sugiarto, A., Rizky, R., Susilawati, Hakim, Z., & Wardah, N. N. (2022). Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Desa dengan Penerapan e-Surat Berbasis Web di Desa Sukacai Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/002.202271.31>